

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2012, *Hukum Migas*, Total Media, Jakarta

Bohari, H., S.H., M.H., 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Judisseno, Rimmsy K., 1997, *Pajak dan Strategis Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.

Maftuh Efendi dan Tri Cahya Indra Permana, 2018, "*Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung*", Media Hukum, Jakarta

M, Agus Santoso, 2014, "*Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", Cetakan Kedua., Penerbit Kencana, Jakarta.

M. Farouq S, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV Rajawali, Jakarta.

Rochmat Soemitro, 1998 *Pajak dan Pembangunan*, Ed.2, Enresco, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Eveline Julieta Dortia Sianipar, 2023

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENAAN PPN ATAS TRANSAKSI JUAL BELI GAS BUMI (PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: PUT-3362/B/PK/PJK/2020).

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum Perdata Bisnis

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Transaksi Jual Beli Gas Bumi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Transaksi Jual Beli Gas Bumi

Keputusan Menteri Keuangan No. 162/KMK.03/2017 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Transaksi Jual Beli Gas Bumi

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-7/PJ.05/2017 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Transaksi Jual Beli Gas Bumi

Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: Kep-07/MEM/2015, Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tentang Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Putusan Pengadilan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 3362/B/PK /PJK/2020

Makalah/Tesis/Disertasi:

Dharma Wirandoko, 2011, *Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabeanan Dengan Fasilitas Masterlist (Suatu Studi Di Job Pertamina Talisman Jambi Merang)*, Karya Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.

Sumber Internet dan Lainnya:

Ditjen Pajak, 2016, *Belajar Pajak*, terdapat dalam: <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses pada tanggal: 04 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB.

Hukum Online, “*Pengadilan Pajak Dari Masa ke Masa*”, terdapat dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ebf7c92e4425/pengadilan-pajak-dari-masa-ke-masa>., diakses pada tanggal: 04 Januari 2023, Pukul 17.53 WIB.